

Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik)

Sutrisno ⁽¹⁾

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi; Universitas Yos Soedarso; notriss@gmail.com

Eko Wahyudi ⁽²⁾

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi; Universitas Yos Soedarso

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing Fund (DBH) on economic growth in the Greater Surabaya area of East Java Province. This research was conducted in the Greater Surabaya area, East Java Province using the saturated sampling method in determining the sample with the population and the sample being the City of Surabaya, Sidoarjo Regency, Gresik Regency in 2015 - 2019. Data collection was carried out through non-participant observation techniques. Data analysis was performed using descriptive analysis and multiple linear regression. Based on the results of the study, it shows that Regional Original Income (PAD) and Special Allocation Funds (DAK) have a positive effect on economic growth in the Greater Surabaya area, East Java Province. Meanwhile, the General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH) have a negative effect on economic growth in the Greater Surabaya area.

Keywords : *Economic Growth; Regional Income; Greater Surabaya.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur menggunakan metode sampling jenuh dalam penentuan sampel dengan populasi dan sampel adalah wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik pada tahun 2015 - 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi nonpartisipan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya Raya..

Kata kunci : *Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan Daerah; Surabaya Raya.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja- belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2017) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah

tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan faktor DAK sebagai variabel independen yang mempengaruhi anggaran belanja modal.

Rumusan Masalah

Pentingnya belanja modal untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal ?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal;
2. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal;
3. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal;

Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
2. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap anggaran belanja modal.

Metode

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.

B. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se- Surabaya Rayadari tahun 2015-2019.

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro & Supomo, 1999). Berdasarkan karakteristiknya yang dipakai sebagai sampel adalah Kabupaten dan Kota di Surabaya Rayayang memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana Kabupaten dan Kota tersebut menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2019.

Dari karakteristik di atas dapat dilihat yang termasuk sampel adalah keseluruhan dari populasi. Dengan demikian maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu pemerintah kabupaten dan kota di Surabaya Raya sejumlah 3 Kabupaten Kota.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain.

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah :

1. Data Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2019, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet dimana dari dokumen ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka- angka, dan bersifat obyektif.

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen.

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Belanja modal

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Indikator variabel ini diukur dengan :

- a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- b) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.
- c) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Dapat disimpulkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt}-\text{PDRBt-1})}{(\text{PDRBt-1})} \times 100\%$$

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

dirumuskan :

4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dimana kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber

pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sehingga DAU untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai responden atau data variabel yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi.

b. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik yaitu dengan cara menganalisis grafik normal probability plot. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Data akan normal jika signifikansinya $< \alpha = 0,05$. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model distribusi tidak memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat bebas dari asumsi klasik, dimana data tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

1) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas untuk menguji korelasi antara variabel bebas (independen) dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan variabel bebas lainnya. Semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan regresi harus mempunyai tolerance di atas 10%. Pada umumnya jika VIF lebih besar daripada 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedasitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedasitas.

3) Uji Auto Korelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan model Durbin Watson (dw test). Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel error-term pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel error-term pada periode lain yang bermakna variabel error-term tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat. Langkah pendeteksiannya adalah dengan membandingkan nilai Durbin Watson Statistic Table dengan H_0 tidak ada autokorelasi bila DW berada di :

0 (a) dl (b) du (c) (4-du) (d) (4-dl) (e) 4

H_0 = tidak ada autokorelasi

(a) = daerah menolak H_0 = ada autokorelasi positif

(b) = daerah ragu-ragu

(c) = daerah tidak menolak H_0 = tidak ada auto korelasi positif atau negatif

(d) = daerah ragu-ragu

(e) = daerah menolak H_0 = ada autokorelasi negatif.

d. Uji Regresi Berganda

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple regression), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = error

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis

(daerah dimana H_0 ditolak). SeJawa Timurnya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (pooled data) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi:

1) Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada level of significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

b. Jika t hitung > t tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

2) Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada level of significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika F hitung < F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

b. Jika F hitung > F tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

3) Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

PDRB Kota Surabaya tahun 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan secara fluktuatif seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2.

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 Kota Surabaya, 2015-2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|------|------|------|------|------|
|----------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 1.954.367,9 | 1.982.149,3 | 2.087.311,5 | 2.182.148,2 | 2.243.344,2 |
| Pertambangan dan Penggalian | 98.015,9 | 105.140,1 | 106.351,6 | 102.076,4 | 104.234,3 |
| Industri Pengolahan | 1.074.565,5 | 1.163.278,2 | 1.283.499,3 | 1.387.237,8 | 1.447.932,0 |
| Konstruksi | 2.478.052,5 | 2.623.076,0 | 2.705.925,4 | 2.817.432,2 | 3.009.188,4 |
| Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor Transportasi dan | 1.749.222,3 | 1.905.693,4 | 2.073.020,0 | 2.238.226,3 | 2.359.245,7 |
| Pergudangan | 4.552.037,7 | 4.826.614,9 | 4.958.177,6 | 5.093.133,8 | 5.552.875,0 |

Bersambung

Lanjutan Tabel 2.

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 6.117.806,9 | 6.631.284,5 | 7.132.961,5 | 7.640.246,9 | 8.142.314,5 |
| Informasi dan Komunikasi | 1.824.268,4 | 1.927.366,1 | 2.092.928,0 | 2.276.899,0 | 2.481.239,4 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 653.915,5 | 737.528,2 | 819.727,5 | 890.634,6 | 957.430,1 |
| Real Estat | 945.467,0 | 1.010.167,5 | 1.115.698,2 | 1.202.303,5 | 1.264.178,2 |
| Jasa Perusahaan | 185.228,6 | 202.083,0 | 220.511,4 | 236.098,9 | 248.113,4 |
| Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial | 999.984,2 | 998.014,5 | 1.122.021,4 | 1.229.680,2 | 1.324.152,8 |
| Wajib Jasa Pendidikan | 768.876,5 | 873.738,8 | 981.167,1 | 1.062.447,7 | 1.137.383,7 |
| Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 304.442,6 | 343.019,6 | 391.441,8 | 432.650,2 | 468.674,4 |
| Jasa Lainnya | 195.488,3 | 203.367,3 | 222.346,9 | 240.596,0 | 261.506,7 |
| PDRB | 24.027.651,2 | 25.666.531,6 | 27.458.060,1 | 29.180.479,4 | 31.160.584,6 |

Sumber: Kta Surabaya dalam Angka, 2020

Berdasarkan Tabel 2, sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Surabaya Rayahingga tahun 2019 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu mencapai Rp 8.142.314,5 Juta. Sektor tersebut merupakan salah satu aktivitas produksi yang menjadi prioritas sumber pendapatan Kota Surabaya. Sektor lain seperti sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan, perdagangan besar & bceran; reparasi mobil & sepeda motor, dan konstruksi juga menjadi prioritas sumber pendapatan Kota Surabaya.

PDRB Kabupaten Gresik tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan secara fluktuatif yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 Kabupaten Gresik, 2015-2019

(Dalam Juta rupiah)

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|------|------|------|------|------|
|----------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pertanian, Kehutanan, & Perikanan Pertambangan dan | 1.772.274,8 | 1.804.395,0 | 1.870.783,4 | 1.949.996,3 | 1.973.164,9 |
| | 260.421,6 | 280.506,0 | 280.047,1 | 256.986,5 | 265.287,2 |
| Penggalian Industri | 1.501.771,7 | 1.640.968,4 | 1.793.255,7 | 1.928.535,6 | 2.022.979,9 |
| Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas | 13.381,0 | 14.515,7 | 14.917,6 | 14.970,2 | 16.960,9 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang Konstruksi | 20.664,4 | 21.876,2 | 23.482,5 | 23.871,4 | 24.792,6 |
| | 1.544.565,7 | 1.641.724,9 | 1.671.547,2 | 1.732.060,3 | 1.837.461,3 |
| Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 938.789,8 | 1.027.761,0 | 1.104.118,8 | 1.189.094,4 | 1.278.598,2 |
| Transportasi dan | 125.057,5 | 133.163,6 | 144.471,1 | 150.549,5 | 163.449,9 |
| Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi dan | 2.525.457,3 | 2.713.859,3 | 2.899.290,2 | 3.106.769,3 | 3.394.590,0 |
| Komunikasi | 920.958,3 | 977.032,7 | 1.047.158,6 | 1.149.421,7 | 1.246.320,3 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 481.544,8 | 546.922,6 | 600.078,1 | 635.393,0 | 669.875,9 |
| Real Estat | 640.064,9 | 686.696,3 | 748.568,1 | 785.713,5 | 819.983,9 |
| Jasa Perusahaan | 139.646,5 | 152.983,8 | 164.763,1 | 176.970,1 | 191.531,8 |
| Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib | 764.623,2 | 766.275,3 | 850.280,9 | 919.456,3 | 979.802,8 |
| Jasa Pendidikan | 268.997,7 | 306.949,7 | 340.205,9 | 371.284,9 | 396.327,9 |
| Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 368.614,5 | 417.041,7 | 469.722,3 | 513.030,9 | 559.127,87 |
| Jasa Lainnya | 221.829,2 | 231.724,9 | 250.055,2 | 269.213,0 | 289.653,25 |
| PDRB | 12.508.662,9 | 13.364.397,1 | 14.272.745,4 | 15.173.314,9 | 16.129.908,4 |

Sumber: Kabupaten Gresik Angka, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2, sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Gresik hingga tahun 2019 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu mencapai Rp 3.394.590,0 juta. Sektor tersebut merupakan salah satu aktivitas produksi yang menjadi prioritas sumber pendapatan Kabupaten Gresik. Sektor lain seperti sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, & perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar & eceran; reparasi mobil & sepeda motor dan informasi & komunikasi juga menjadi prioritas sumber pendapatan Kabupaten Gresik.

PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan secara fluktuatif yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo, 2015-2019

(Dalam Juta rupiah)

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 2.520.268,0 | 2.581.438,5 | 2.673.872,1 | 2.726.575,0 | 2.868.766,1 |
| Pertambangan dan Penggalian | 149.887,4 | 162.129,6 | 162.091,1 | 156.343,8 | 160.641,03 |
| Industri Pengolahan | 585.413,3 | 639.107,6 | 695.818,6 | 771.128,6 | 808.679,8 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 11.987,4 | 13.043,9 | 13.567,6 | 13.460,6 | 13.717,3 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 20.230,4 | 21.507,3 | 23.118,8 | 23.573,1 | 24.445,7 |
| Konstruksi | 1.078.816,2 | 1.151.525,4 | 1.174.085,7 | 1.255.518,9 | 1.343.604,7 |
| Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 855.403,5 | 940.291,0 | 1.011.444,2 | 1.105.066,7 | 1.186.417,8 |
| Transportasi dan | 178.684,0 | 191.052,9 | 207.718,4 | 214.611,4 | 233.058,4 |
| Pergudangan | 1.892.207,9 | 2.050.685,0 | 2.189.285,6 | 2.310.918,9 | 2.438.015,0 |
| Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 897.151,5 | 902.890,8 | 1.003.277,0 | 1.086.304,4 | 1.154.801,7 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan | | | | | |

Lanjutan Tabel 4.

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jasa Pendidikan | 166.284,3 | 190.546,9 | 211.487,4 | 236.334,2 | 255.736,5 |
| Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 215.096,7 | 244.384,1 | 275.640,2 | 310.429,8 | 334.490,8 |
| Jasa Lainnya | 194.354,5 | 203.882,7 | 220.318,9 | 241.638,5 | 260.341,8 |
| PDRB | 10.500.462,3 | 11.178.190,8 | 11.908.302,1 | 12.651.398,6 | 13.426.017,7 |

Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka, 2020

Berdasarkan Tabel 4, sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Sidoarjo hingga tahun 2019 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai Rp 2.868.766,1 juta. Sektor tersebut merupakan salah satu aktivitas produksi yang menjadi prioritas sumber pendapatan Kabupaten Sidoarjo. Sektor lain seperti sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, perdagangan besar & eceran; reparasi mobil & sepeda motor, dan administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib juga menjadi prioritas sumber pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah data dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 pengamatan yang diperoleh dari sampel sebanyak 4 kabupaten/kota dengan 5 tahun pengamatan. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| PAD | 20 | 12,12 | 15,09 | 13,3878 | 0,92140 |
| DAU | 20 | 12,57 | 13,62 | 13,2023 | 0,30970 |
| DAK | 20 | 6,29 | 12,44 | 9,7592 | 1,95832 |
| DBH | 20 | 9,77 | 11,99 | 10,6769 | 0,64601 |
| PDRB | 20 | 24,55 | 49,46 | 33,3010 | 7,72456 |
| Valid N (listwise) | 20 | | | | |

Sumber: Data diolah, 2020

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini telah dilakukan dan diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 18,390 | 31,984 | | 0,575 | 0,574 |
| PAD | 8,303 | 0,602 | 0,990 | 13,784 | 0,000 |
| DAU | -5,907 | 1,961 | -0,237 | -3,013 | 0,009 |
| DAK | 0,677 | 0,208 | 0,172 | 3,254 | 0,005 |
| DBH | -2,328 | 0,545 | -0,195 | -4,274 | 0,001 |

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat pada Tabel 7, maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 18,390 + 8,303X_1 - 5,907X_2 + 0,677X_3 - 2,328X_4 + e$$

Nilai konstan 18,390 berarti bahwa jika PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan DBH (X4) diasumsikan tidak mengalami perubahan, maka nilai PDRB (Y) adalah sebesar 18,390 satuan. Nilai koefisien regresi PAD (X1) adalah sebesar 8,303 berarti bahwa jika PAD (X1) naik sebesar satu satuan, sementara DAU (X2), DAK (X3), dan DBH (X4) diasumsikan tetap, maka PDRB (Y) akan meningkat sebesar 8,303 satuan. Nilai koefisien regresi DAU (X2) adalah sebesar -5,907 berarti bahwa jika DAU (X2) naik sebesar satu satuan, sementara PAD (X1), DAK (X3), dan DBH (X4) diasumsikan tetap, maka PDRB (Y) akan menurun sebesar 5,907 satuan. Nilai koefisien regresi DAK (X3) adalah sebesar 0,677 berarti bahwa jika PAD (X1) naik sebesar satu satuan, sementara PAD (X1), DAU (X2), dan DBH (X4) diasumsikan tetap, maka PDRB (Y) akan meningkat sebesar 0,677 satuan. Nilai koefisien regresi DBH (X4) adalah sebesar -2,328 berarti bahwa jika DBH (X4) naik sebesar satu satuan, sementara PAD (X1), DAU (X2), dan DAK (X3) diasumsikan tetap, maka PDRB (Y) akan menurun sebesar 2,328 satuan.

Hasil uji pengaruh variabel PAD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB diperoleh koefisien regresi sebesar 8,303 dan nilai signifikasinya adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai koefisien regresi pada variabel PAD membuktikan bahwa adanya pengaruh positif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka, dapat dikatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018). Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin

tinggi PAD yang diperoleh masing- masing kabupaten di wilayah Surabaya Raya, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur.

Hasil uji pengaruh variabel DAU terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB diperoleh koefisien regresi sebesar -5,907 dan nilai signifikasinya adalah sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi nilai koefisien regresi pada variabel DAU membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka, dapat dikatakan bahwa H2 ditolak dan H0 diterima. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi DAU yang diterima masing-masing kabupaten di wilayah Surabaya Raya, maka pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur akan menurun. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni dkk., (2016) dan Panji (2019) yang menemukan DAU memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa semakin besar jumlah DAU yang diterima, maka akan dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena penyerapan DAU masih belum signifikan. Selain itu, kemungkinan dapat disebabkan karena jumlah DAU yang diterima dipengaruhi oleh kenaikan PAD yang ada di wilayah tersebut.

Hasil uji pengaruh variabel DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB diperoleh koefisien regresi sebesar 0,677 dan nilai signifikasinya adalah sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai koefisien regresi pada variabel DAK membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka, dapat dikatakan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi DAK yang diterima masing- masing kabupaten di wilayah Surabaya Raya, maka pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur akan meningkat pula. Hal ini disebabkan karena DAK yang diterima secara keseluruhan telah digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2016).

Hasil uji pengaruh variabel DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB diperoleh koefisien regresi sebesar -2,328 dan nilai signifikasinya adalah sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi nilai koefisien regresi pada variabel DBH membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif DBH terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka, dapat dikatakan bahwa H4 ditolak dan H0 diterima. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi DBH yang diterima masing-masing kabupaten di wilayah Surabaya Raya, maka akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2016) dan Dewi (2018) yang menemukan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa semakin besar jumlah DBH yang diterima, maka akan dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena realisasi DBH yang diterima secara keseluruhan kurang berkontribusi untuk pembangunan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Jika ada penggunaan DBH untuk peningkatan daerah itu hanya sebagian kecil dan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang ada di daerah tersebut, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya juga semakin tinggi. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila semakin tingginya pengalokasian realisasi DAU yang diberikan dari pemerintah pusat dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena DAU secara keseluruhan tidak digunakan untuk peningkatan ekonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur. Hasil tersebut menandakan bahwa pemberian pengalokasian realisasi DAK oleh pemerintah pusat yang semakin tinggi dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peorlehan DBH oleh pemerintah daerah yang semakin tinggi DBH yang maka akan dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena secara keseluruhan DBH kurang berkontribusi untuk peningkatan daerahnya.

Saran yang bisa diberikan adalah sebagai Pemerintah daerah diharapkan lebih fokus dalam mendalami dan mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing kabupaten/kota di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur antara lain :

- a. upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Surabaya Raya dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah adalah dengan cara menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata khususnya sektor penyedia akomodasi serta makan dan minum yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gresik, yaitu perdagangan besar dan eceran, perhotelan serta restoran.
- b. upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Surabaya Raya dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah adalah dengan cara mengembangkan ekonomi berbasis kreatif serta sebuah usaha kerakyatan ekonomi berbasis pada produk unggulan daerah (*one village one product* atau OVOP) yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gresik, yaitu perdagangan besar dan eceran, perhotelan serta restoran.
- c. upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah adalah dengan cara meningkatkan memfasilitasi berkembangnya agribisnis dan agrowisata melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal serta berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo, seperti petani tanaman pangan antara lain: padi dan palawija.

Saran lainnya yang dapat disampaikan adalah kepada pemerintah masing – masing daerah di wilayah Surabaya Raya Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih mengoptimalkan penggunaan DAU dan DBH untuk mendanai setiap kebutuhan daerahnya agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya masing – masing. Sedangkan saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel lain seperti Belanja Daerah dan memperpanjang rentang periode penelitian sebagai salah satu cara mengembangkan penelitian.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Sri dan Suyana Utama. 2017. Analisis Pusat Pertumbuhan di Karangasem. *E - Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4 (4), 220-229.
- Achmad, Kuncoro. 2001 Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik. Cetakan Pertama. Bandung: ALFABETA
- Aprisa, Lintanti Fajar. 2016 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Perumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Ekonomi. *Dipenogoro Journal of Economics*, 2(1).
- Aristovnik, A. 2015 Fiscal Decentralization Eastern Europe: Trend and selected Issu. *Transilvanian Review of Administrative Science*. (37/E), 5-22.
- Arsad, Lincolyn. 2018. Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aulia, Nely. 2017. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. *Economics Development Analysis Journal (EDAJ)*, 3 (2).
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2019. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2018 (persen).
- Badan Pusat Statistik 2019. Jawa Timur dalam angka 2019. Denpasar: BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Surabaya Raya dalam angka 2017. Denpasar: BPS Jawa Timur.
- . 2020. Surabaya Raya Dalam Angka 2017. Denpasar: BPS Jawa Timur.
- . 2020. Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2017. Denpasar: BPS Jawa Timur.
- . 2020. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur 2015 – 2019. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Chinweoke, N; Ray. N. and Paschal, N. O. 2017 Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economic Growth (1992-2011). *The Macrotheme Review: A Multidisciplinary Journal of Global Macro Trends*, 3 (7), 79-87.
- Chude, N. P. and Chude, D. I. 2016 Impact of Government Expenditur on Economics Growths Nigeria. *International Journals of Busines and Management Review*, 1 (4), 64-71.
- Devkota K. L. 2017 Impact of Fiscal Decentralization on Economics Growths in The District of Nepal. *International Center for Publics Policy Working Paper*, 14-20 March 2017.
- Edogbanya. Adejoh, and J.G. Sule. 2016. Revenu Generations: It is impact on Government Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *Global Journal of Management and Business research Administration and Management*, 13 (4), 1-15.
- Faridi, Muhammad Zahir. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economics Growths: Evidence from Pakistan. *Paksitan Journal of Social Science (PJSS)*, 31 (1), 1-13
- Jaya, I P.N. Panji Kartika dan A.N.B. Dwiandra. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7 (1), 79-92.
- Jumadi, Pudjiharjo M., G. Maski, dan M. Khusaini. 2016. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economics Developmentt East Java. *IOSR Journal of Humanity and Social Science (IOSR - JHS)*, 13 (1).
- Norregaard, John. 2016. Taxing Immovablee Property: Revenue Potency and Impelmentation Challenges. IMF Working Paper.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.358.913&rep=rep1&type=pdf>. Diakses 17 Juni 2017
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. Grasindo: Jakarta.
- Nurlis. 2019. The Factor Afecting of the Capital Expenditure Alocation Case: The Local Goverment of Indonesia. *Research Journal of Finances and Accounting*, 7(1).

- Kuznets dalam Jhingan. 2000. Teori pertumbuhan ekonomi.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV Andy Offset
- Mahmudi. 2009. Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Erlangga
- Mawarni, dan Darwanies Syukri Abdullah. 2016. Pengaruh Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2 (2), 80-90.
- Parsiyo dan Widia Iswara Madya. 2016. Indikator Keberhasilan Pembangunan. PPMKP Bogor, Jawa Barat.
- Putri, Zuwesti Eka. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 (2).
- Santosa, Budi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5 (2).
- Wijayanto, A. 2019. Pengaruh Variabel Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Pasta Gigi Pepsodent PT. Unilever Indonesia, Tbk. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1), 83-94.
- Wijayanto, A., & Armadani, S. P. 2020. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PERUMAHAN TIPE CLUSTER DI KOTA SIDOARJO. *Yos Soedarso Economic Journal (YEJ)*, 2(2), 66-72.
- Budiyanto, A. P. S., & Rusdiyanto, W. H. 2021. The Capital Adequacy Ratio And The Loan To Deposit Ratio Influence On The Price Of Banking Companies: Evidence From Indonesia. *Multicultural Education*, 7(6).
- Wijayanto, A., Winarni, E., & Mahmudah, D. S. 2021. Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan. *Yos Soedarso Economics Journal*, 3(1), 99-136.